

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2008



DITERBITKAN : NOPEMBER 2008
DATA : OKTOBER 2007 – SEPTEMBER 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KATA PENGANTAR

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Bangli adalah laporan ilmiah tentang Status Lingkungan Hidup yang bersifat multisektoral dan diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan data dan penyajian informasi segala aspek lingkungan hidup yang sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangli terdiri dari empat komponen utama yakni : Latar Belakang, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Analisis Isu Lingkungan dan Evaluasi Kebijakan dan Rekomendasi yang merupakan acuan dari pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup.

Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 ini berkat adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak termasuk Dinas/Instansi yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas upaya dan bantuannya sehingga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dapat tersusun dengan baik.

Harapan kami semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangli ini dapat dijadikan salah satu sarana penilaian keberhasilan penyelenggaraan Tata Praja Lingkungan Hidup (*Good Environmental Governance*) di Kabupaten Bangli.

Bangli Nopember 2008
Kepala Badan Lingkungan Hidup,
Kabupaten Bangli

Ir. A. A. Ngurah Warnama
NIP. 010 204 484

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Tujuan Penulisan Pelaporan | I-1 |
| 1.2. Isu Lingkungan Hidup..... | I-3 |
| 1.3. Kebijakan Pengelolaan dan Pendanaan Lingkungan | I-4 |
| 1.4. Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | I-5 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM | II-1 |
| 2.1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bangli | II-1 |
| 2.2. Gambaran Umum Kabupaten Bangli..... | II- 2 |
| | |
| BAB III SUMBER DAYA AIR | III-1 |
| 3.1. Status | III-1 |
| 3.2. Tekanan | III-2 |
| 3.3. Respon | III-4 |
| | |
| BAB IV UDARA DAN ATMOSFER..... | IV-1 |
| 4.1. Status | IV-1 |
| 4.2. Tekanan | IV-2 |
| 4.3. Respon | IV-2 |
| | |
| BAB V LAHAN DAN HUTAN | V-1 |
| 5.1. Status | V-1 |
| 5.2. Tekanan | V-6 |
| 5.3. Respon | V-7 |
| | |
| BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI | VI-1 |
| 6.1. Status | VI-1 |
| 6.2. Tekanan | VI-2 |
| 6.3. Respon | VI-2 |
| | |
| BAB VII PESISIR DAN LAUT | VII-1 |
| 7.1. Status | VII-1 |
| 7.2. Tekanan | VII-1 |
| 7.3. Respon | VII-3 |
| | |
| BAB VIII LINGKUNGAN PERMUKIMAN..... | VIII-1 |
| 8.1. Status | VIII-1 |
| 8.2. Tekanan | VIII-2 |
| 8.3. Respon | VIII-2 |

| | |
|--|------|
| BAB IX AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP..... | IX-1 |
| 9.1. Pencemaran Air dan Masalah Air Bersih | IX-1 |
| 9.2. Pencemaran Udara | IX-2 |
| 9.3. Lahan dan Hutan | IX-2 |
| 9.4. Keanekaragaman Hayati | IX-3 |
| 9.5. Pesisir dan Danau | IX-3 |
| 9.6. Sampah, Limbah dan Sanitasi Lingkungan..... | IX-4 |

Daftar Pustaka

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------|
| 3.1. Model Analisis P-S-R | I-2 |
| 3.1. Potensi Sebaran Air Tanah dan Mata Air di Provinsi Bali | III-3 |
| 4.1. Kondisi udara di Terminal Loka Srana Bangli..... | IV-1 |
| 4.2. Kondisi udara di TPA Bangklet..... | IV-2 |
| 5.1. Alih Fungsi Lahan..... | V-2 |
| 5.2. Peta lereng Provinsi Bali | V-3 |
| 5.3. Peta Erosi Provinsi Bali | V-4 |
| 5.4. Lahan kritis di Bangli | V-5 |
| 5.5. Peta lahan kritis di Provinsi Bali | V-5 |
| 5.6. Penambangan bahan galian C di Kintamani | V-6 |
| 7.1. Pengembangan budidaya ikan keramba | VII-1 |
| 7.2. Perambahan sempadan danau oleh pengusaha kolam pancing di Desa Kedisan..... | VII-2 |
| 7.3. Pola pengolahan lahan di pinggir Danau Batur | VII-3 |

BAB I

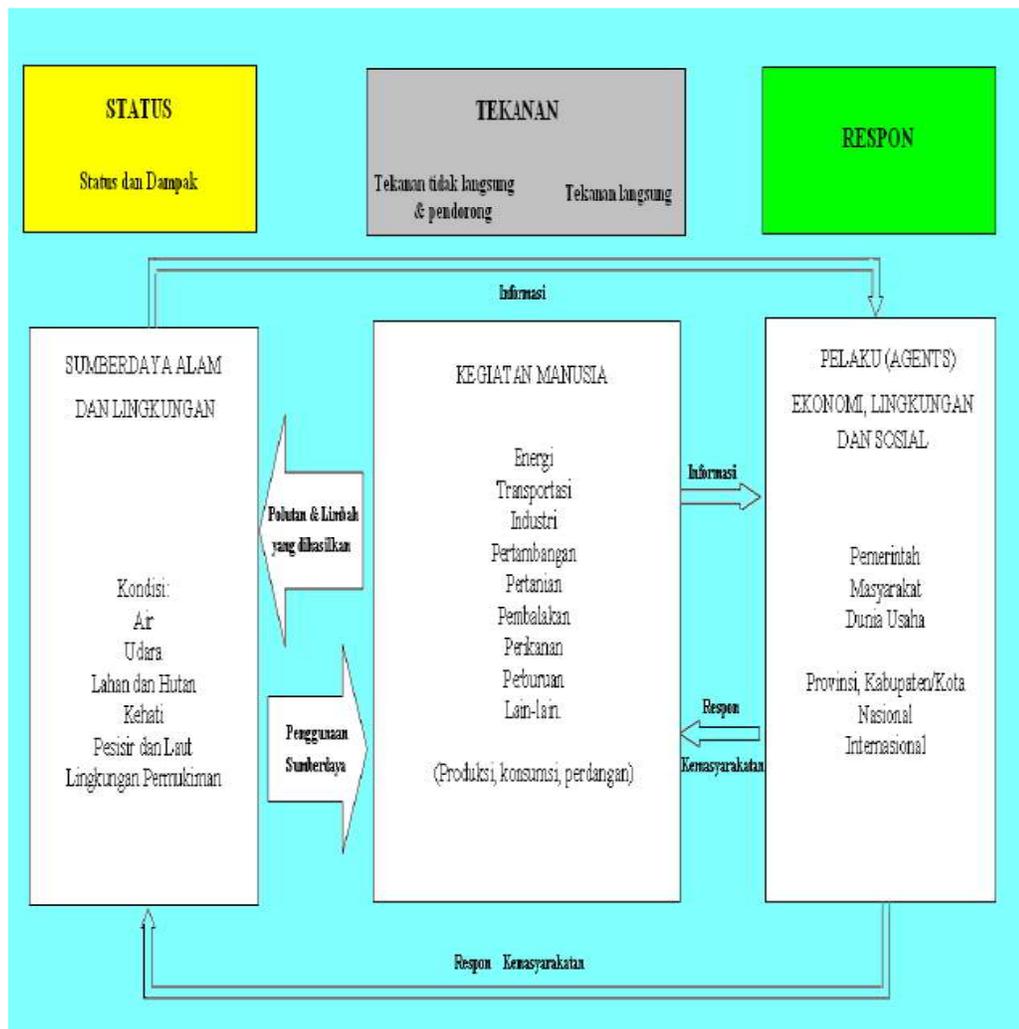
PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan laporan

Penguatan perhatian terhadap lingkungan hidup di daerah tidak terlepas dari proses desentralisasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten yang diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 125, TLNRI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 No. 108, TLNRI No.4548). Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf j, Pasal 14 ayat (1) huruf j dan Pasal 22 Pasal 22 huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pada penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan latar belakang penetapan hal itu yakni karena berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara, antara lain dengan perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat , serta untuk pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Secara substansi , adanya desentralisasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup itu telah menyebabkan kewenangan Pemerintah Bangli di Bidang Lingkungan Hidup menjadi semakin luas dengan harapan pengelolaannya dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik permasalahan lingkungan hidup setempat. Pergeseran itu sejalan dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang telah menjadi tuntutan masyarakat dunia, nasional maupun daerah. Pertumbuhan kesadaran manusia dalam menghormati serta melindungi lingkungan hidup dengan mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Kazi F, jalan dan jo Anne DiSano, 1999 :1). Pembangunan yang berkelanjutan secara konseptual adalah pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat memenuhi kebutuhan generasi muda masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa yang akan datang. Unsur-unsur pendukung pembangunan seperti : sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan maupun sumber daya manusianya dalam hal ini diperlukan dalam keadaan berimbang. Dalam rangka hal itu maka kepentingan untuk pelestarian lingkungan lingkungan hidup beserta

fungsinya harus dimasukkan kedalam setiap proses kegiatan pembangunan politik, ekonomi, maupun social budaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Konsekuensi lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Bangli dituntut mengembangkan system data lingkungan hidup yang memadai untuk mengambil keputusan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan model akuntabilitas public, sarana pendidikan dan pengawasan bagi public, dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa (*good governance*). Dengan demikian penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli disamping sesuai dengan kerangka tersebut diatas, juga didasarkan atas Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-1324/SES/LH/02/2007 perihal penyusunan dan penyampaian Laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta disepakati menggunakan metode S-P-R (State-Pressure-Response) dari UNEF untuk penyusunan laporan SLH bersangkutan.



Gambar 1. Model analisis menggunakan Metode S-P-R
 Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli , 2008

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli tahun 2008 ini dimaksudkan untuk tujuansebagai berikut :

- a. Menyediakan fondasi yang handal berupa data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli.
- d. Menyediakan informasi tentang status lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan Hidup (*Good Environmental Governance*) di daerah; sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta sarana pendidikan untuk kepentingan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2. Isu Lingkungan Hidup

Tekanan terhadap lingkungan hidup semakin nampak di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia pada umumnya serta Kabupaten Bangli pada khususnya. Isu-isu utama lingkungan hidup yang muncul akhir-akhir ini di Kabupaten Bangli telah berhasil diinventarisasi oleh tim peneliti dalam laporan SLHD Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan
2. Lahan Kritis
3. Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Galian C
4. Kerusakan Hutan
5. Masalah Air Bersih
6. Menurunnya Keanekaragaman Hayati
7. Bencana Alam
8. Pencemaran Air dan Udara
9. Sampah dan Limbah
10. Permasalahan Sanitasi Lingkungan
11. Menurunnya Budaya Hidup Sehat

12. Masalah Kemiskinan

Munculnya isu-isu lingkungan hidup yang strategis di Kabupaten Bangli mengindikasikan bahwasanya sudah terjadi pergeseran keseimbangan ekologis, adanya tekanan dan permasalahan lingkungan hidup, cenderung semakin berat dan kompleks. Hal ini terkait dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kebutuhan penduduk semakin meningkat dan kompleks, pertumbuhan ekonomi lebih maju; sedangkan pada sisi yang lain sumberdaya alam yang semakin terbatas dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi semakin kompleks. Kondisi ini juga dipacu oleh kedatangan masyarakat pencari pekerjaan (urbanisasi), karena Kabupaten Bangli diyakini masih memberikan peluang kerja serta harapan hidup yang lebih baik, terutama yang terkait dengan sektor pariwisata.

Akhir-akhir ini telah ada beberapa gerakan penyelamatan - pelestarian lingkungan hidup (antara lain yang dilakukan oleh kalangan industri/swasta, kalangan LSM lingkungan, institusi pendidikan, serta pemerintah). Dengan semakin beratnya tekanan terhadap lingkungan, maka kesadaran berbagai lapisan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sangat perlu ditingkatkan.

1.3. Kebijakan Pengelolaan dan Pendanaan Lingkungan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bangli berupaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan untuk dapat mendukung pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk itu dilakukan langkah-langkah berupa :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan, dan
3. Meningkatkan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi PAD, bagi hasil pajak, dan dana perimbangan yang lebih proporsional.

Secara khusus untuk pengelolaan lingkungan terkait dengan alokasi anggaran (induk dan perubahan) tahun 2007 di instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangli tahun anggaran 2007 sebesar Rp. jumlah anggaran ini meningkat dari anggaran 2006 sebesar Rp..... sementara untuk tahun 2008 jumlah anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bangli yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Bangli Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bangli Tahun 2008 adalah sebesar Rp.....

1.4. Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terhadap permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi seperti diatas, ada kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup melalui pemantapan kawasan lindung dan budidaya, pengendalian konsumsi dan aktivitas yang ramah lingkungan. Selanjutnya agenda pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli adalah sesuai dengan Renstra Kabupaten Bangli dan RPJM Kabupaten Bangli.

Dalam melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut, program pokok pembangunan lingkungan hidup dalam kurun waktu tahun 2006-2010 adalah :

1) Program Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Program ini terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya adalah :

- a) Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup melalui penerbitan ijin SITU/HO bagi aktivitas pengusaha.
- b) Melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan akibat erosi air dan pemulihan fungsi daerah resapan.

2) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya adalah :

- a) Melaksanakan pembinaan terhadap sikap hidup masyarakat dalam mengelola lingkungan sesuai dengan fungsinya dan teknologi yang akrab lingkungan.
- b) Melaksanakan pembinaan perindungan sekolah dan kesehatan lingkungan.
- c) Melaksanakan Pekan Penghijauan Nasional (PPN).
- d) Melaksanakan pembinaan kebersihan dan pertamanan kepada masyarakat
- e) Melaksanakan pembinaan kader lingkungan

Sehubungan dengan kebijakan penegelolaan pendapatan daerah, komponen pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, dan lain-lain yang sah. Adapun jenis PAD terdiri dari : pajak daerah, restribusi daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari : pajak bumi dan bangunan (PBB), biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan perorangan (PPh), SDA, Dana alokasi Umum (DAU) dan dana alokasi Khusus (DAK).

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Visi dan Misi

RPJM tersebut di atas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 – 2010 maka Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli mengacu kepada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli.

Visi pembangunan berkelanjutan tercermin dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli yakni; *“terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Bangli yang berbudaya didukung oleh perekonomian daerah yang maju berdasarkan Tri Hita Karana”*. Visi tersebut dalam pembangunan berkelanjutan diwujudkan dalam beberapa “misi” sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengoptimalkan potensi bidang pertanian , pariwisata dan industri kecil didukung infrastruktur ekonomi yang memadai, dengan tetap mengedepankan aspek pemerataan hasil – hasil pemangunan disegala bidang.
- b. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai terutama pembangunan RSUD yang representatif dan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting kesehatan untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang mantap.
- c. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan pemerataan pendidikan serta memantapkan pembangunan pusat pendidikan Hindu Widyalyaya.
- d. Mewujudkan kelestarian kebudayaan daerah, serta meningkatkan peran lembaga tradisional dan lembaga adat yang dijiwai oleh Agama Hindu.
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang stabil serta mengutamakan penegakan supremasi hukum.
- f. Mewujudkan pembangun yang berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan kependudukan dan mewujudkan perlindungan sosial kepada masyarakat rawan sosial.
- h. Meningkatkan pelayanan dan administrasi umum pemerintahan terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menuju terwujudnya Good Governance.

2.2. Gambaran Umum Kabupaten Bangli

Letak geografis Kabupaten Bangli terletak antara 115° 13' 48" BT sampai dengan 115° 27' 24" BT dan 8° 8' 30" LS sampai dengan 8° 31' 87" LS, posisinya berada ditengah tengah Pulau Bali, Sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki laut/pantai. Luas wilayah Kabupaten Bangli 520, 80 Km² atau 9,25 % dari luas wilayah Provinsi Bali, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 100 sampai dengan 2.152 m, sehingga tanaman apapun bisa tumbuh diaerah ini. Secara fisik dibagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi adalah puncak penulisan , terdapat gunung batur dengan kepundannya Danau Batur yang memiliki luas sekitar 1.067, 50 Ha. Wilayah Kabupaten Bangli berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten, dimana jarak dari ibukota Provinsi sekitar 40 km. Batas wilayah Kabupaten Bangli mencakup :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah timur : Kabupaten Karangasem
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klungkung dan Gianyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Badung.

Kabupaten Bangli memiliki iklim tropis dengan suhu udara relative rendah berkisar antara 15 ° C sampai dengan 20 ° C berada di daerah kabupaten Bangli bagian Utara dan Suhu relative tinggi di daerah bagian selatan yaitu berkisar antara 27 ° C sampai dengan 30 ° C.

Angka curah hujan rata-rata tahunan terendah adalah 900 mm dan tertinggi adalah 3.500 mm. Penyebaran curah hujan yang relative tinggi (2.500 – 3.500) meliputi bagian utara (lereng gunung batur dan semakin rendah keselatan. Curah hujan tertinggi pada bulan desember sampai dengan maret sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. Bulan April dan bulan September merupakan bulan transisi dari musim penghujan kemusim kemarau atau sebaliknya. Luas dan sebaran kawasan yang ada di Kabupaten Bangli adalah:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Selain fungsi utama tersebut, kawasan lindung juga berfungsi untuk menjaga kelestarian manusia dan makhluk hidup lainnya dari kerawanan kondisi fisik. Sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah untuk meningkatkan fungsi lindung dari tanah, air dan iklim (hidro orologis), serta mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan type ekosistem serta keunikan alam. Penggunaan kawasan lindung menjadi

titik tolak bagi pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bangli yang belandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah ditetapkan kawasan lindung sebagai limitasi dan kendala bagi pengembangan wilayah selanjutnya dapat ditentukan arah pengembangan kawasan budidaya. Pengelompokan kawasan lindung menurut keppres no. 32 tahun 1990 terdiri dari 4 (empat) sub kawasan utama yaitu :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawah nya adalah hutan lindung. Kawasan Hutan Lindung dikabupaten Bangli seluas 6.239, 01 Ha atau 11,79 % dari luas kabupaten. Lokasi hutan lindung sebageian besar berada di Kecamatan Kintamani yang meliputi : kawasan hutan lindung Munduk Pengejaran seluas 613 Ha, Kawasan Hutan Lindung Gunung Abang seluas 14.006,18 Ha dan Kawasan Hutan Lindung Penulisan seluas 5.663,7 Ha.
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari : Kawasan sempadan Sungai kawasan ini tersebar disetiap kecamatan (Bangli, Tembuku, Susut dan Kintamani) baik pada aliran sungai alami maupun buatan. Luas kawasan ini ditetapkan yaitu untuk sungai diluar kawasan permukiman, jarak sempadan sisi kiri dan kanan ditetapkan sejauh 50 meter dari tepi sungai yang tidak bertanggul dan 25 meter dari sungai bertanggul sesuai dengan Permen PU No. 63/PRT/1993. Kawasan sekitar Danau ini luasnya ditetapkan minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi. Kawasan mata air terdapat diseluruh kecamatan diKabupaten Bangli yang potensi pemanfaatanya sangat setrategis. Dari 500 mata air yang ada di Provinsi Bali, 154 buah (30,80 %) berada di Kabupaten Bangli dengan debit total 763,366 liter / detik. Mengingat sebagian besar kawasan mata air berada di daerah kawasan atas, merupakan wilayah dengan kecendrungan kurang sumber air maka untuk menjaga jumlah dan debit perlu dijaga luasan hutan yang ada di Kecamatan Kintamani, karena hutan menjadi stabillisator tata hidrologis bawahannya. Kebijakan pemanfaatan ruang bagi perlindungan kawasan disekitar mata air dan radius pengamanan kawasan disekitar mata air adalah 200 meter. Kawasan sempadan jurang adalah kawasan dengan kemiringan lereng 40 % dan kedalaman sekurang-kurangnya 5 meter dari garis datar. Sebaran kawasan sempadan jurang terdapat diseluruh kecamatan.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah merupakan kawasan yang merupakan kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimal pemanfaatan kegiatan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Bangli adalah :

a. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi yang merupakan kawasan penyangga hutan lindung, sebagian besar ada di Kecamatan Bangli Utara yang terdiri atas kawasan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap dan hutan konservasi. Luas hutan produksi berupa produksi terbatas adalah seluas 453 Ha.

b. Kawasan pertanian

Kawasan pertanian meliputi kawasan pertanian budidaya tanaman pangan lahan basah seluas 2.855 Ha, lahan kering seluas 9.341 Ha dan kawasan budidaya tanaman keras (perkebunan) 11.076 Ha.

c. Kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata mempunyai kegiatan pariwisata sehubungan dengan adanya obyek yang menarik dikawasan tersebut baik wisata alam maupun wisata seni dan budaya. Sesuai dengan tata ruang Provinsi Bali bahwa Kabupaten tidak memiliki kawasan pariwisata yang ada hanya obyek dan daya tarik wisata (ODTW) khusus.

Ketersediaan air bersih adalah merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan kehidupan manusia baik kebutuhan air bersih bagi keperluan rumah tangga , perkantoran, perhotelan dan industri. Terlebih dalam lingkungan kehidupan perkotaan kebutuhan air bersih kadang-kadang menjadi sangat kompleks dan rumit karena menyangkut berbagai kepentingan.

Keberadaan sumber daya air akan menjadi terganggu bahkan terancam apabila system pengolahan lahan terutama pada lahan tadah air (catchment area), kurang baik seperti penempatan permukiman terlalu padat, penebangan hutan, ataupun penambangan bahan galian.

Air permukaan dari hasil pengamatan peta hidrologi tinjau Bali skala 1 : 250.000, daerah Kabupaten Bangli memiliki potensi air permukaan yang cukup besar.

Keterdapatn sungai-sungai dan kemunculan mata air yang cukup menyebar merupakan sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk merekomendasikan pemanfaatan dan penanganan potensi air permukaan bagi kebutuhan penduduk dan perencanaan pengembangan wilayah.

Sumberdaya air permukaan didaerah penyelidikan berupa air sungai dan mata air yang jumlahnya cukup banyak. Sungai-sungai kecil bermuara ke sungai yang lebih besar sebagai sungai utama yang mengalir kearah pantai dibagian selatan. Kemunculan mata air terdapat pada lereng, kaki gunung atau kontak pada dua lapisan

Keberadaan sungai –sungai dan mata air tersebut perlu dikaji ulang terutama pengamatan kuantitas dan kualitas air sehingga diharapkan akan memberi rekomendasi kelayakan potensi air terutama air bersih bagi keperluan penduduk. Pengelolaan sumber daya air juga harus diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan.

Air tanah adalah semua air yang terdapat atau terkandung dibawah permukaan tanah yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai factor seperti iklim dan kondisi alam sekitarnya, antara lain bentuk topografi, jenis batuan, besarnya curah hujan dan tata guna lahan.

Peresapan air permukaan kedalam tanah pada dasarnya bergerak secara gravitasi melalui rongga antar butir pada tanah maupun batuan atau melalui rekahan pada batuan yang kemudian terperangkap pada lapisan batuan (akuifer). Air yang terkandung pada lapisan tanah/batuan tersebut kemudian disebut sebagai air tanah. Wilayah Kabupaten Bangli yang dibentuk oleh batuan hasil kegiatan vulkanik memiliki potensi sumber daya alam terutama bahan galian golongan C yang cukup melimpah. Didalam proses geodinamika yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, telah membentuk beberapa jenis bahan galian seperti pelapukan, bahan rombakan dan material bentukan hasil pengerjaan ulang yang bersifat lepas atau pasir, kerikil, dan batu yang sebagian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.

Berdasarkan penggunaan lahan, tata guna lahan di Wilayah Kabupaten Bangli yang perlu untuk diperhitungkan dan dikembangkan baik secara kuantitas dan kualitas. Bila dilihat dari penggunaan tanahnya wilayah seluas 52.080 Ha. Sekitar 2.886 Ha lahan sawah, 25.102 Ha lahan kering, 9.341 Ha Hutan Negara, hutan produksi 453 Ha, Hutan suaka alam 574 Ha, Hutan wisata alam 2.075 Ha lahan perkebunan 11.706 Ha dan sisanya seluas 3.045 Ha merupakan lahan lain-lain (jalan, Sungai, kuburan dan lain-lain).

Dengan gambaran umum diatas maka dapat kita bayangkan sekarang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan serta berkembangnya kemajuan ilmu dan teknologi baik dibidang peralatan pendukung pertanian dan dan aplikasinya dibidang pertanian dalam arti luas sehingga menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas air yang ada sekarang ini. Dibidang pertanian yang factor yang menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas air adalah adanya alih fungsi lahan atau perambahan hutan sehingga banyak kehilangan mata air yang menyebabkan debit air menjadi berkurang. Disamping itu juga penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan cara pengolahan lahan pertanian menyebabkan banyak sumber air kita tercemar. Dari bidang peternakan banyak banyak petani ternak yang belum mengelola limbahnya dengan baik sehingga berkontribusi untuk mencemari badan air. Di bidang industri seperti industri rumah tangga banyak yang belum mengelola limbahnya dengan baik dibuang begitu saja kesungai sehingga sungai menjadi tercemar. Untuk indutri yang lebih besar juga ada masih beberapa yang belum mengelola limbahnya dengan baik sehingga kucing-kucingan dengan pihak instansi yang menangani lingkungan hidup. Dari berbagai jenis kejadian atau kasus diatas dapat kita bayangkan bagaimana keadaan sungai kita sekarang dan yang akan datang?

Pembangunan berkelanjutan tidak tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik, ke dalam kerangka proses pembangunan. Agenda 21 telah mengekspresikan bahwa perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan merupakan satuan yang tidak dapat dipisahkan dan secara global sangat penting meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan antara manusia dan lingkungannya serta hubungan sebab akibatnya. Kenyataan ini menggaris bawahi pentingnya laporan pengelolaan lingkungan hidup yang memberikan informasi tentang kondisi lingkungan secara berkesinambungan terutama pada tingkat daerah. Hal ini selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota).

Pembangunan yang dilaksanakan memiliki dua modal utama yaitu sumber daya alam dan sumberdaya manusia. Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli sebagai sub sistem pembangunan Bali tidak bisa lepas dari kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kebutuhan penduduk semakin meningkat dan kompleks, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju; sedangkan pada sisi lain

sumberdaya alam ketersediaannya terbatas dan pengelolaan lingkungan hidup semakin rumit dan kompleks.

Perencanaan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, hendaknya tetap berakar pada konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia masa kini dengan tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa datang. Tujuan pembangunan jangka pendek jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan, karena dapat merusak kualitas sumberdaya dalam lingkungan tersebut. Apabila kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka akibatnya tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang tetapi juga dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Kebijaksanaan pendanaan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya di Kabupaten Bangli dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sudah ditetapkan dalam visi dan misin Kabupaten Bangli dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 – 2010, seperti yang tercantum dalam matrik program lima tahunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangli (hal 130 – 411).

BAB III SUMBER DAYA AIR

3.1. Status

a. Air Hujan

Di Kabupaten Bangli terdapat 6 stasiun pemantau curah hujan yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli. Untuk memantau curah hujan, suhu dan kelembaban berdasarkan data yang ada curah hujan tertinggi berada pada bulan Februari 2008 yaitu sebesar 2.129.mm dan terendah pada bulan juli 2008 yaitu sebesar 91 mm

b. Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah yang muncul di atas permukaan tanah disebut mata air. Potensi air tanah dan mata air sangat tergantung dari kondisi litologinya. Litologi dapat digunakan untuk menentukan akifer yang merupakan indikator besar-kecilnya potensi air tanahnya. Sedangkan mata air pada dasarnya merupakan bagian dari air tanah yang keluar ke permukaan. Kedua sumber ini pada umumnya lebih banyak dipilih dalam pemanfaatan air bersih bagi penduduk, karena kualitasnya cenderung lebih baik dari pada air permukaan. Khusus untuk mata air, walaupun menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan air bersih manusia, namun keberadaan mata air di suatu daerah tidak mudah didapatkan. Disamping distribusinya tidak merata, mata air juga mempunyai debit yang sangat bervariasi, yang kadang-kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi suatu daerah peruntukan.

Berdasarkan hasil pemantauan mata air di Kabupaten Bangli berjumlah 164 buah tersebar di masing – masing kecamatan (Lampiran profil Program menuju Indonesia Hijau, 2007).

Penggunaan air tanah di Kabupaten Bangli masih sangat minim karena kedalaman sumber air sangat dalam bahkan mencapai ratusan meter dari permukaan tanah sehingga dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkannya.

c. Air Permukaan

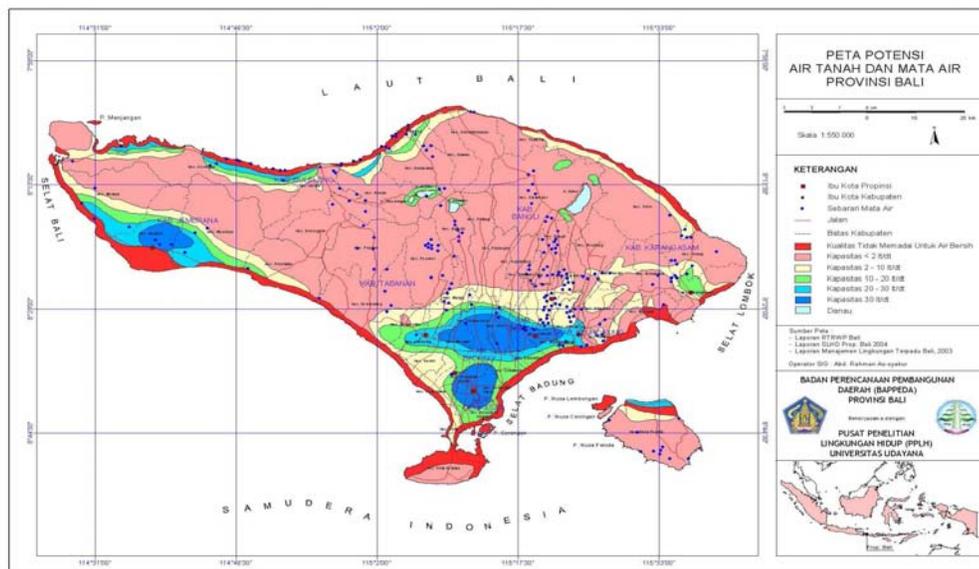
Air permukaan merupakan air yang mengalir di permukaan tanah, yang pada umumnya disebut dengan sungai. System sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari Timur ke Barat. Sungai yang mengalir ke Selatan pada umumnya lebih panjang dari pada sungai yang mengalir ke Utara. Karakteristik aliran sungai merupakan refleksi langsung dari curah hujan, dengan penurunan limpasan yang terjadi selama Bulan Maret sampai Mei setelah akhir musim hujan. Kira-kira 80 % dari curah hujan akhirnya masuk ke dalam system sungai, sisanya "hilang" karena penguapan dan terserap ke dalam cadangan air tanah

Berdasarkan pada Basis data Lingkungan hidup Provinsi Bali 2006 besarnya potensi air permukaan di Kabupaten Bangli adalah sebesar 452,3 juta m³/ tahun. Dilihat dari karakteristik sungai di Kabupaten Bangli mempunyai sungai yang aliran sungainya selalu mengalir sepanjang tahun.

Danau merupakan salah satu sumber air bersih yang berasal dari air permukaan, disamping air sungai. Kabupaten Bangli memiliki Danau terbesar di Bali yaitu Danau Batur, dengan karakteristik sebagai berikut; luas tadah 105,36 km², luas permukaan 16,05 km² dan kedalaman 70 meter. Danau Batur memiliki volume air sebesar 815,38 juta M³.

3.2. Tekanan

Air bersih sangat tergantung dari dua komponen pokok yaitu potensi sumber air dan besar serta jenis kegiatan yang memanfaatkan. Potensi sumber air bersih pada umumnya dapat bersumber dari air tanah, mata air dan air permukaan atau air sungai. Dari ke tiga sumber yang umum digunakan sebagai sumber air bersih, air sungai merupakan pilihan terakhir, karena kualitasnya paling jelek kalau dibandingkan dengan air tanah dan mata air. Namun demikian air sungai pada umumnya mempunyai kelebihan dari segi kuantitas.



Gambar 3.1. Potensi Sebaran Air Tanah dan Mata Air di Provinsi Bali

Air permukaan merupakan air yang mengalir di permukaan tanah, yang pada umumnya disebut dengan sungai. System sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari Timur ke Barat. Sungai yang mengalir ke Selatan pada umumnya lebih panjang dari pada sungai yang mengalir ke Utara. Karakteristik aliran sungai merupakan refleksi langsung dari curah hujan, dengan penurunan limpasan yang terjadi selama Bulan Maret sampai Mei setelah akhir musim hujan. Kira-kira 80 % dari curah hujan akhirnya masuk ke dalam system sungai, sisanya “hilang” karena penguapan dan terserap ke dalam cadangan air tanah

Berdasarkan pada Basis data Lingkungan hidup Provinsi Bali 2006 besarnya potensi air permukaan di Kabupaten Bangli adalah sebesar 452,3 juta m³/ tahun. Dilihat dari karakteristik sungai di Kabupaten Bangli mempunyai sungai yang aliran sungainya selalu mengalir sepanjang tahun.

Danau merupakan salah satu sumber air bersih yang berasal dari air permukaan, disamping air sungai. Kabupaten Bangli memiliki Danau terbesar di Bali yaitu Danau Batur, dengan karakteristik sebagai berikut; luas tadah 105,36 km², luas permukaan 16,05 km² dan kedalaman 70 meter. Danau Batur memiliki volume air sebesar 815,38 juta M³.

Kebutuhan air di Kabupaten Bangli dapat diklasifikasikan menjadi kebutuhan untuk pertanian, hutan, domestik, industri, pemerintahan dan fasilitas umum.

Masalah air bersih yang terjadi di Kabupaten Bangli pada umumnya diakibatkan oleh tidak merata dan tidak seimbangnya potensi air yang tersedia dengan besarnya kebutuhan. Kebutuhan air yang terus meningkat terutama di kota-kota akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Peningkatan kebutuhan yang ternyata tidak diikuti dengan peningkatan potensi dan jumlah air baku, bahkan cenderung sumber air baku semakin sulit diperoleh.

Berdasarkan atas karakteristik potensi air dan kebutuhan air di Kabupaten Bangli, maka penyebab terjadinya masalah air bersih adalah faktor alam yang menyebabkan kecilnya potensi air, tingkat kemajuan dan perkembangan daerah, dimana potensi airnya cukup tetapi tidak mampu memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, cepatnya peningkatan kebutuhan akan air bersih yang melampaui kemampuan sumberdaya air untuk mendukungnya.

Dampak yang akan terjadi kalau masalah ini berlanjut adalah air bersih menjadi kritis pada daerah Kabupaten Bangli alternatif untuk mendapatkan air bersih semakin sulit dan mahal.

3.3. Respon

Langkah-langkah penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah seperti mencari air alternatif selain air tanah, air sungai dan mata air yang ada di lokasi kritis air, pemanfaatan sumber-sumber air yang ada. Apapun alternatif yang dipilih air bersih di Kabupaten Bangli pasti akan menjadi langka atau kritis pada suatu saat, kalau pemanfaatan air selalu melebihi potensi kemampuan yang kita miliki disamping mencari sumber air alternatif langkah yang tak kalah pentingnya dapat dilakukan adalah meningkatkan potensi sumberdaya air melalui pelestarian fungsinya dan mulai memberdayakan hemat air di seluruh aspek kehidupan. Disamping itu juga saat ini sedang gencarnya dilaksanakan program penghijauan baik di kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan melalui kegiatan , kecil menanam, wanita menanam, gerhan, PPN, dan reboisasi.

BAB IV UDARA DAN ATMOSFER

4.1. Status.

Udara merupakan komponen kehidupan yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara terdiri dari campuran bermacam-macam gas yang perbandingannya tidak tetap tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Dalam udara terdapat oksigen, untuk bernafas dan karbondioksida untuk proses fotosintesis dan ozon untuk menahan sinar ultraviolet. Oleh karena itu hal yang terpenting dari udara adalah kualitasnya bagi kehidupan kita. Dilapisan atmosfer inilah zat-zat pencemar yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia disimpan dan diencerkan ataupun disebarkan kewilayah lain, oleh karena itu pengelolaan terhadap praisai udara. Keadaan kwalitas udara di Kabupaten Bangli masih relatif bersih dengan dibuktikan hasil pengamatan dan pemantauan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2002 yang bertempat di Terminal Bangli dan TPA Bangklet. Rincian dari hasil pengamatan dan pemantauan masing- masing tempat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terminal Bangli kualitas udaranya mengandung $0,06 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Tibal (Pb) masih dibawah baku mutu lingkungan Provinsi Bali yang nilai standarnya adalah $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan mengandung $84,18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ debu masih dibawah baku mutu lingkungan Provinsi Bali yang nilai standarnya adalah $230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ debu.



Gambar 4.1. Kondisi Udara di Terminal Loka Srana Bangli

2. TPA Bangklet kualitas udaranya mengandung $0,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Tibal (Pb) masih dibawah baku mutu lingkungan Provinsi Bali yang nilai standarnya adalah $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan mengandung $126,26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ debu masih dibawah baku mutu lingkungan Provinsi Bali yang nilai standarnya adalah $230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ debu.



Gambar 4.2. kondisi udara di TPA Bangklet.

4.2. Tekanan

Di kabupaten Bangli yang memberi tekanan terhadap pengelolaan udara bersih adalah gas buang emisi kendaraan bermotor walaupun tidak menunjukkan hubungan yang signifikan karena jumlah kendaraan di Kabupaten Bangli masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kendaraan di kabupaten yang lainnya yang ada di Provinsi Bali yaitu: mobil penumpang 233 buah, bus 40 buah, truck umum 436 buah, truck pribadi 280 buah, truck engkel 113 buah dan sepeda 59.208 buah.

4.3. Respon

Program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka merespon dari pada pencemaran udara ambien di Kabupaten Bangli melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli adalah memberlakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor bagi kendaraan yang akan melakukan perpanjangan uji kelayakan jalan. Disamping program diatas juga dilakukan kegiatan penghijauan disepanjang jalan.

BAB V LAHAN DAN HUTAN

5.1. Status

Luas wilayah Kabupaten Bangli keseluruhan 520,81 km², yang terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, Kecamatan Tembuku dan Kecamatan Bangli.

Berdasar data Bangli Dalam Angka 2006, dari data luas yang ada penggunaan lahan di Kabupaten Bangli tahun 2006 menunjukkan bahwa sekitar 2.888 Ha merupakan lahan sawah, 25.612 Ha merupakan lahan kering, 9.341 merupakan hutan negara, 11.196 Ha merupakan tanah perkebunan dan sisanya 3.035 Ha merupakan lahan lain-lain (jalan, sungai dll)

Secara visual banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan untuk sawah, tegalan, perkebunan maupun hutan. Peralihan fungsi perkebunan tanaman keras ke tanaman musiman / hortikultura, dapat dilihat di kecamatan Kintamani karena lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Namun demikian dari segi lingkungan akan dapat mengurangi daya tangkapan air maupun rawan terjadinya erosi dan longsor. Demikian pula halnya fungsi hutan karena adanya kebakaran, perambahan, dan lainnya seperti analisis pada kerusakan hutan, maka fungsi hutan sebagai kawasan lindung akan menurun.

Selain itu, alih fungsi lahan terjadi dari lahan tegalan/perkebunan menjadi fasilitas penunjang pariwisata yang diusahakan maupun menjadi lahan tidur. Lahan tidur banyak terjadi dan dapat mengurangi keindahan lingkungan. Bila dilihat perkembangan pembangunan jumlah sarana akomodasi, kapasitas kamar, dan tempat tidur, pada tahun 2001 jumlah sarana akomodasi, kapasitas kamar, dan tempat tidur adalah masing-masing hotel non bintang 23 unit, kamar 249 unit, dan tempat tidur 401 buah sedangkan tahun 2005 sarana akomodasi, kapasitas kamar dan tempat tidur masing-masing sudah menjadi hotel non bintang 24 unit, kamar 255 unit, dan tempat tidur 402 buah.

Terjadinya alih fungsi lahan akan menyebabkan berbagai permasalahan, seperti: alih fungsi lahan hutan akan terus mengurangi jumlah luasan hutan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bangli, alih fungsi lahan di kawasan hulu berpengaruh terhadap daerah bawahannya, serta alih fungsi lahan sawah akan mengurangi swa sembada beras dan

dapat menimbulkan degradasi budaya, terutama yang terkait dengan pertanian. Di sisi lain budaya adalah menjadi unggulan dalam pengembangan pariwisata Bali.



Gambar 5.1. Alih Fungsi Lahan

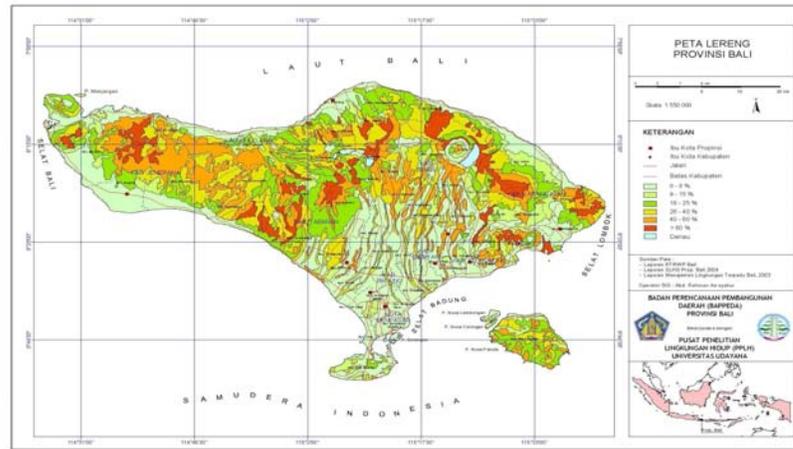
Alih fungsi lahan sawah yang beririgasi teknis telah diatur dalam Kepres, namun penegakan aturan terhadap hal tersebut belum efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah kabupaten Bangli. Untuk itu diperlukan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif terhadap alih fungsi lahan yang terjadi, peran serta semua pihak agar menyadari dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya alih fungsi lahan terhadap lingkungan sekitar, maupun kawasan yang lebih luas. Pembangunan infrastruktur terkait dengan pemanfaatan lahan juga diperlukan agar produktivitas lahan bisa dikembangkan secara optimal.

5.2. Lahan Kritis

Kondisi topografi Kabupaten Bangli yang luas wilayahnya 520,81 km², merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi hampir 85 % dari luas wilayah seluruhnya. Relief Kabuapten Bangli merupakan rantai pegunungan yang membentang dari Barat ke Timur. Ditinjau dari kemiringan lahannya, maka Kabupaten Bangli sebagian besar terdiri dari lahan dengan kemiringan antara 0 – 2 % sampai dengan 15 – 20 %, sedangkan selebihnya adalah lahan dengan kemiringan di atas 40 %.

Daerah wilayah Kabupaten Bangli bagian Selatan adalah lahan dengan kemiringan 0 - 15 %. Daerah dengan kemiringan 15 – 40 % meliputi wilayah bagian utara Kabuapten Bangli mengikuti deretan perbukitan yang membentang dari arah Barat ke

Timur wilayah tersebut. Daerah dengan kemiringan melebihi 40 % merupakan daerah perbukitan.



Gambar 5.2 . Peta Lereng Provinsi Bali

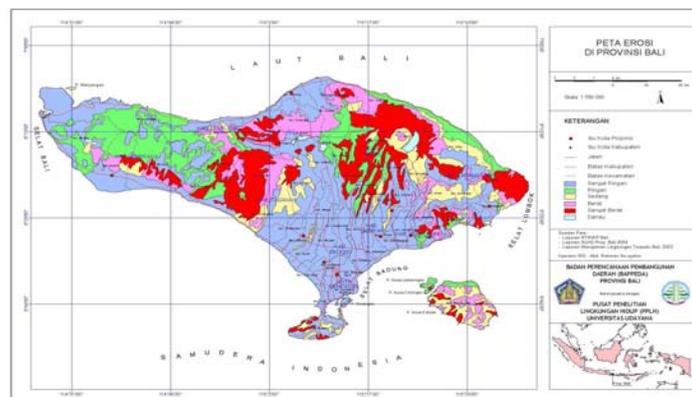
Wilayah Kabupaten Bangli merupakan daerah resapan air bagi Bali Utara, timur, Selatan dan barat. Namun daerah ini cukup rawan mengalami kerusakan akibat meningkatnya bahaya erosi dan longsor. Hal ini disebabkan karena kemiringan lereng di daerah ini tergolong curam berkisar 15 – 40 % sampai lebih dari 45 %. Jenis tanahnya andosol dan regosol yang peka erosi. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi berkisar 2500 – 3000 mm/tahun. Selain itu penutupan vegetasi di daerah ini jarang, lebih banyak pertanian tanaman pangan dengan konservasi tanah yang kurang memadai.

Tingkat erosi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangli berkisar dari sangat ringan sampai sangat berat. Erosi sangat ringan terdapat pada penggunaan lahan sawah yang tersebar pada lahan daerah bawah .

Tingkat erosi sedang sampai berat secara umum terjadi pada penggunaan lahan tegalan dan kebun campuran, serta sedikit pada semak belukar dengan kelas kemiringan lereng 3 % - 45 %. Erosi sedang yang terjadi pada penggunaan lahan tersebut terdapat pada lahan dengan kemiringan lereng 3 % - 15 %, sedangkan erosi berat pada kemiringan lereng 15 – 45 %. Tingkat erosi berat yang terjadi pada lahan tersebut, selain karena keadaan lerengnya yang cukup curam juga karena penutupan

lahannya termasuk jarang dan tindakan konservasi tanah dan air yang kurang memadai.

Pada penggunaan lahan kebun campuran, tegalan dan semak dengan kelas kemiringan lereng 8 % – 65 %, erosi yang terjadi umumnya tergolong sangat berat, terutama pada lereng dengan kemiringan lebih besar dari 65%. Erosi sangat berat yang terjadi pada lereng 8 – 30 % sangat ditentukan oleh faktor vegetasi (pengelolaan tanaman) dan tindakan konservasi tanah dan air yang sangat kurang, sedangkan pada kelas lereng 30 – 65 % selain karena lerengnya yang curam juga karena tindakan konservasinya yang sangat tidak memadai.



Gambar 5.3. Peta Erosi Provinsi Bali

Kerusakan atau degradasi lahan banyak terjadi pada lahan kering, terutama pada lahan kering yang ditanami tanaman pangan dan perkebunan rakyat. Degradasi terjadi antara lain, karena lahan kering terbuka oleh pekerjaan pengolahan tanah, pembakaran, penyiangan bersih dan penggembalaan, sehingga tanah mudah tererosi dan longsor. Selain itu, sistem usaha tani yang terkenal eksploitatif dimana sebagian besar sisa tanamannya diangkut keluar atau dibakar tanpa usaha mengembalikannya telah mempercepat proses penurunan bahan organik tanah. Akibatnya terbentuk lahan tandus yang sering dikenal dengan lahan kritis. Lahan kritis juga dapat terjadi apabila erosi tidak ditanggulangi dengan baik. Lahan kritis merupakan lahan yang karena tidak sesuai penggunaan dengan kemampuannya, yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik/kimia/biologi, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan social ekonomi di daerah lingkungannya (Simposium Lahan Kritis, 1975 dalam Puslitanak, 1977). Secara ringkas

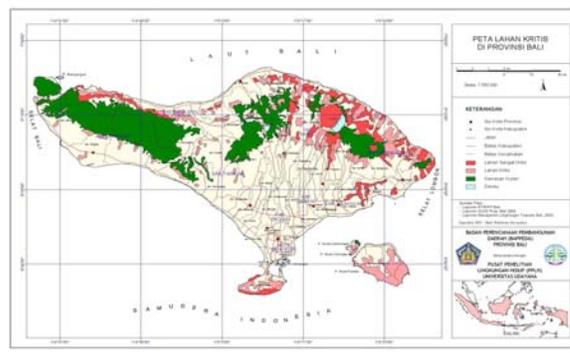
lahan kritis diartikan sebagai lahan yang secara potensial tidak mampu berperan dalam salah satu atau beberapa fungsinya sebagai :

- (1) Unsur produksi pertanian (fungsi pertanian)
- (2) Media pengaturan tata air (fungsi hidrologi)
- (3) Media perlindungan alam lingkungan (fungsi orologi)



Gambar 5.4. Lahan Kritis di Bangli

Luas lahan kritis di Kabupaten Bangli pada tahun 2004 adalah 38.572 ha (Terlampir pada tabel). Lahan kritis di luar kawasan hutan 29.232 ha. Di dalam kawasan hutan terdapat lahan kritis 9.340 ha.



Gambar 5.5. Peta Lahan Kritis Provinsi Bali

Penanggulangan lahan kritis telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi profesi maupun swadaya masyarakat. Pemerintah secara nasional telah memprogramkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GERHAN) untuk menanggulangi lahan kritis. Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli telah pula melakukan kegiatan penanaman berupa reboisasi. Kegiatan penanaman meliputi luas 170 ha dengan jumlah tanamam 129.838 pohon dari berbagai

jenis (Terlampir pada tabel). Mengingat luasnya lahan kritis di Kabupaten Bangli, maka usaha reboisasi dan penghijauan masih sangat perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

5.2. Tekanan

Kabupaten Bangli memiliki wilayah dengan potensi tambang galian C tersebar di empat kecamatan. Eksplorasi galian C yang paling banyak terdapat di Kecamatan Kintamani seperti yang tersaji dalam lampiran yaitu seluas 22,9 ha. Penambangan yang dilakukan belum ada berijin dari pemerintah Kabupaten Bangli. Jenis Galin C yang teridentifikasi ada sebelas jenis, yaitu: batu padas, tanah liat, pasir batu, tanah urug, batu tabas, batu andesit, batu apung, batu barak (merah) dan batu pilah, . Potensi galian masih tersedia diperkirakan mencapai 4.580.000 m³ dengan kedalaman penambangan 20 m. Dari potensi pertambangan yang ada dan terus meningkatnya usaha pertambangan menimbulkan keawatiran akan terjadinya degradasi lingkungan fisik maupun sosial. Pengamatan lapangan terhadap beberapa usaha pertambangan galian C menunjukkan bahwa terjadi degradasi lingkungan fisik dan sosial.



Gambar 5.6. Penambangan Bahan Galian C di Kintamani

Penambangan Galian C di Kawasan Kintamani menimbulkan bising dan debu, sehingga dapat mengganggu fungsi kawasan sebagai salah satu destinasi wisata di Pulau Bali. Operasional pengangkutan bahan galian C selama 24 jam menyebabkan kebisingan terutama di malam hari. Selain itu, penambangan batu padas juga telah menimbulkan dampak terhadap pendangkalan muara sungai. Kerusakan akibat pengangkutan, kecelakaan kerja, serta kerusakan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi fisik geografisnya.

Pengalihan/pengupasan lahan untuk tanah liat akan berpotensi menu-runkan kualitas lingkungan, menim-bulkan polutan saat pembakaran, serta saat pengangkutan akan dapat merusak infrastruktur yang ada.

Luas hutan di Kabupaten Bangli adalah 9.351,28 ha atau 17,96 % masih berada dibawah kondisi yang ideal ≥ 30 %. Masalah-masalah lingkungan yang terkait dengan pembangunan kehutanan di Kabupaten Bangli meliputi gangguan keamanan hutan seperti penebangan liar atau pencurian hasil kayu hutan dan perambahan hutan oleh penduduk di sekitar kawasan hutan dan membongkar hutan daun jarum yang kecil daya pegang airnya serta miskin humus. Berbagai isu dan permasalahan hutan di Kabupaten Bangli muncul akibat lemahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan, masih adanya lahan di sekitar kawasan konservasi yang belum dimanfaatkan sehingga tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan juga menjadi faktor pendorong terjadinya gangguan hutan. Adanya gangguan keamanan hutan, keberadaan lahan kritis yang cukup luas dalam kawasan hutan (Terlampir pada tabel), dan adanya alih fungsi/pinjam pakai.

Disamping faktor alam (kebakaran), adanya praktek-praktek penebangan liar, pembirikan dan perambahan hutan untuk budidaya tanaman pangan dan atau pakan ternak secara berlanjut, akan mendukung tingkat kekritisian lahan kawasan hutan.

Adanya penyerobotan lahan kehutanan yang disertifikatkan oleh masyarakat merupakan permasalahan yang perlu mendapat penanganan secara serius, sehingga belum mencapai persyaratan teknis yaitu minimal 30 %.

5.3. Respon

Usaha pengendalian penambangan dengan proses pembinaan kepada pemilik galian nampaknya belum efektif, atau kurang dapat mengendalikan penambang. Hal ini terlihat dari jumlah penambang yang tidak berijin terus meningkat. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah antisipatif dalam mengurangi degradasi lingkungan, seperti: 1) Menerbitkan Perda Kabupaten Bangli tentang Pertambangan Daerah, 2) membuat perencanaan penambangan disesuaikan dengan potensi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya, 3) Melakukan studi lingkungan setiap usaha pertambangan yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, 4) melibatkan pihak-

pihak yang terkait, termasuk masyarakat dalam pengendalian kegiatan penambangan, 5) melakukan kegiatan reklamasi atau pemulihan lahan dan lingkungan pasca tambang.

Rehabilitasi hutan, bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan agar dapat berfungsi kembali secara optimal. Rehabilitasi meliputi : reboisasi, dan reklamasi tambang, dilahan hutan serta menanam tanaman daun lebar dikawasan hutan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, penanggulangan degradasi luas dan kualitas hutan di Bali kiranya perlu dioptimalkan melalui : 1) memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya, 2) mengefektifkan sumberdaya yang tersedia dalam pengelolaan kawasan hutan, 3) memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal, serta 4) memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan dan penggantian tanaman daun jarum dengan tanaman.

Arah sasaran dapat ditopang oleh beberapa program pembangunan di bidang kehutanan seperti : a) penyusunan basis data kehutanan dan potensi sumberdaya hutan, b) memantapkan penataan dan pemetaan c) pengendalian alih fungsi kawasan hutan, d) rehabilitasi hutan dan reboisasi lahan kritis dalam kawasan hutan, e) peningkatan produktivitas hutan dan mutu hutan melalui pengembangan hutan tanaman industri berbasis masyarakat sekitar, f) pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya, dan g) meningkatkan perlindungan dan pengawasan kawasan hutan.

BAB VI.

KEANEKARAGAMAN HAYATI

6.1. Status

Unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistem, pada dasarnya saling tergantung sehingga kerusakan salah satu unsur akan berakibat terganggunya keseimbangan ekosistem. Bali merupakan pulau yang relatif kecil dan mempunyai sebaran topografi dari dataran rendah sampai dataran tinggi serta memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna) beraneka ragam. Berbagai jenis flora dan fauna dijumpai dalam sebaran tipe ekosistem (tipe hutan dataran rendah - hutan hujan tropis pegunungan) : cagar alam, hutan lindung, taman wisata alam, hutan wisata, dan hutan rakyat. Disamping ekosistem hutan, berbagai jenis flora fauna juga dijumpai pada ekosistem lahan kering (pekarangan, perkebunan/ pertanian).

Adanya gangguan keamanan hutan, meluasnya lahan dalam kawasan hutan, dan adanya alih fungsi/pinjam pakai menjadikan berkurangnya jumlah dan jenis vegetasi. Perubahan tersebut menjadikan perubahan keseimbangan ekosistem dan berdampak terhadap terganggunya habitat dan kenyamanan fauna.

Secara umum, permasalahan yang terjadi adalah adanya tekanan terhadap habitat, pemanfaatan yang berlebih, dan pemburuan liar terhadap fauna menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati.

Taman wisata Penelokan yang tersebar pada ketinggian 1200 – 1500 m dpl. Jenis flora yang terdapat dalam kawasan sebagian besar berasal dari hutan tanaman puspa (*Schima noronhaea*) dan teridentifikasi 45 jenis fauna yang terdapat di dalam kawasan. *Kawasan hutan wisata Gunung Batur Bukit Payang* di Desa Penelokan tersebar pada ketinggian 1200 – 1717 m dpl dengan kondisi topografi curam – terjal dengan didominasi hamparan batu lava. Jenis flora yang tumbuh adalah spesifik tanaman tahan kering seperti akasia (*Acasia* sp), ampupu (*Eucalyptus urophylla*) dan sebagian kecil dari jenis cemara (*Casuarina equisetifolia*). Sedangkan jenis fauna yang terdapat dalam kawasan ini mencapai 30 jenis seperti trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix branchura*).

Disamping itu, keberadaan anjing Kintamani dan sapi Bali juga dapat digolongkan sebagai fauna daerah Bali yang endemik.

6.2. Tekanan

Menurun habitat dari pada keaneka ragaman hayati kita sekarang ini tidak terlepas dari pada pengaruh iklim global dan kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun pada musim kemarau di kawasan hutan kita. Ini tentunya memberi pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari flora dan fauna kita yang hampir punah. Keadaan ini juga diperparah dengan adanya perburuan liar terhadap flora dan fauna oleh masyarakat yang ada disekitaran hutan.

6.3. Respon

Pelaksanaan program pengadaan bibit tanaman, penghijauan, dan upaya penegakan hukum bagi perusak habitat/ekosistem hutan, merupakan hal yang telah diupayakan oleh pemerintah. Disamping itu, penanggulangan dengan melibatkan masyarakat adat (*desa adat*) dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan kiranya merupakan kebijakan yang perlu ditingkatkan keberadaannya.

Upaya penanggulangan lainnya dapat diupayakan melalui peningkatan peran aktif masyarakat dalam bermitra kerja dengan pemerintah (pembentukan kader konservasi), mengintegrasikan usaha konservasi pemanfaatan berbasis ekonomi (penangkaran satwa, pembinaan lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar), mendorong tumbuhnya peranserta masyarakat /generasi muda dalam pelestarian fauna dan habitatnya dan penegakan hukum

BAB VII. PESISIR DAN LAUT

Kabupaten Bangli Tidak memiliki Pesisir dan Laut tetapi memiliki danau yang terluas di Provinsi Bali yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Danau tersebut diberi nama Danau Batur karena terletak dikawasan kaldera Gunung Batur Purba. Danau Batur Berada pada kordinat 115,22415° BT dan 8,16334°LS.

7.1. Status Danau Batur

Kondisi Danau Batur sekarang sudah tidak lagi airnya layak untuk dikonsumsi langsung karena sudah tercemar oleh bahan pencemar dari berbagai aktivitas kegiatan manusia yang ada dikawasan danau. Hasil pemantauan dan pengamatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2006 didapat bahwa kandungan BOD₅, DO, Coliform yang ada di Danau Batur melebihi baku mutu lingkungan Provinsi Bali.

7.2. Tekanan

Ini terjadi karena berkembangnya kegiatan seperti dibawah ini :

1. Pengembangan Budidaya Ikan Keramba di danau.
2. Pengembangan pertanian Hortikultura di kawasan pesisir danau yang menggunakan pestisida dan pupuk anorganik yang pada waktu musim hujan tergerus terbawa air hujan kedanau,
3. Pola pengolahan lahan pertanian seperti pembuatan guludan searah dengan kemiringan lahan menyebabkan banyak terjadinya erosi pada waktu musim hujan yang ada dikawasan sekitar danau batur.
4. Perambahan sempadan danau oleh pengusaha kolam pancing di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.



Gambar. 7.1. Pengembangan budidaya ikan Keramba



Gambar 7.2. Perambahan sempadan danau oleh pengusaha kolam pancing di Desa Kedisan



Gambar 7.3. Pola pengolahan lahan dipinggir Danau Batur

Akibat dari semua kegiatan diatas dapat meningkatkan jumlah populasi alga aquatik berkembang dengan sangat cepat karena tumbuhan air mendapat suplay makanan dari darat akibat adanya erosi tanah yang dibawa oleh air hujan yang banyak mengandung pupuk.

7.3. Respon

Untuk menanggulangnya diperlukan pengelolaan danau secara terpadu oleh berbagai elemen baik dari masyarakat maupun pemerintah sehingga akan tercipta lingkungan danau dan sekitarnya menjadi lebih lestari. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan disekitar kawasan pesisir Danau Batur adalah :

- a. Penanaman pohon akar wangi di pesisir Danau Batur Sepanjang 1 Km di Desa Buahon Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan populasi tanaman berjumlah 6.000 rumpun pohon akar wangi, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi pupuk yang terkandung dalam tanah yang terbawa air hujan kedanau disamping itu juga berfungsi sebagai penyerap zat-zat yang beracun yang dihasilkan oleh pestisida yang ikut larut dalam air hujan yang terbawa ke danau.
- b. Penanaman tanaman langka berupa tanaman upacara untuk sarana kegiatan ritual Agama Hindu Seperti tanaman Jambe/jebug arum, Nagasari,

dll yang jumlahnya mencapai ratusan pohon ditanam di Desa Buahah Tahun 2005.

- c. Penanaman berbagai macam pohon yang jumlahnya mencapai ribuan pohon yang terdiri dari berbagai macam pohon seperti tanaman penghijauan dan tanaman upacara ritual Agama Hindu di Desa Kedisan Tahun 2006
- d. Pembinaan lingkungan hidup yang membahas upaya-upaya pelestarian lingkungan danau yang dihadiri oleh kepala Desa, tokoh masyarakat dan Pemerintah yang diadakan di Kantor Desa Kedisan bekerjasama dengan Bapedalda Provinsi Bali tahun 2007.

BAB VIII

LINGKUNGAN PEMUKIMAN

8.1. Status

Perkembangan kawasan Pemukiman kumuh di Kabupaten Bangli belum dijumpai kawasan permukiman kumuh. Pada umumnya yang dipakai untuk mengukur derajat kekumuhan adalah menggunakan beberapa kriteria diantaranya adalah :

- 1) Kesesuaian peruntukan dengan RUTRK/RTDR
- 2) Status kepemilikan lahan
- 3) Letak/kedudukan lokasi kawasan kumuh
- 4) Tingkat kepadatan penduduk
- 5) Jumlah penduduk miskin
- 6) Kegiatan usaha ekonomi penduduk di sektor informal
- 7) Kepadatan rumah/bangunan
- 8) Kondisi rumah /bangunan
- 9) Kondisi letak rumah/bangunan
- 10) Kondisi sarana dan prasarana lingkungan meliputi : a) penyediaan air bersih, b) jamban keluarga/MCK, c) Pengelolaan sampah, Saluran air/drainase, jalan setapak dan f) jalan lingkungan.
- 11) Kerawanan kesehatan (ISPA, diare, penyakit kulit, usia harapan hidup) dan lingkungan (bencana banjir, kesenjangan sosial).
- 12) Kerawanan sosial (kriminalitas, kesenjangan sosial).

Kucukupan jumlah dan kualitas infrastruktur permukiman yang memadai, merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam membangun derajat kesehatan masyarakat baik di permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Pemenuhan kebutuhan air untuk konsumsi di perkotaan menggunakan air PDAM dan di Perdesaan menggunakan air sumur, ABT, mata air, jubang. Di Kabupaten Bangli penggunaan air PDAM untuk perkotaan mencapai 88,71 % dari jumlah penduduk dan untuk perdesaan mencapai 40,92 % dari jumlah penduduk perdesaan dan sisanya diperdesaan menggunakan air non PDAM sebanyak 23,02 % dari jumlah penduduk perdesaan (Data Membangun Provinsi Bali, 2007).

Kurangnya akses penduduk terhadap sumber daya air khususnya kualitas air yang kurang memadai untuk dikonsumsi juga dapat diindikasikan dari jumlah penderita penyakit diare. Demikian juga dengan aspek sanitasi yang lainnya, yaitu kebersihan lingkungan yang terkait dengan perilaku masyarakat dalam membuang

dan mengelola sampah dapat memicu munculnya lalat sebagai vektor penyakit diare. Lingkungan yang kumuh, seperti sampah menyumbat saluran-saluran air, bak kamar mandi yang jarang dibersihkan, sampah yang berserakan di tempat-tempat umum atau disekitar permukiman yang menampung genangan air hujan, yang dapat menjadi sarang berkembangnya penyakit demam berdarah.

Timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya kepadatan jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi, industri serta sosial budaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Di Kabupaten mempunyai jumlah Keluarga miskin sebanyak 13.191 KK atau 47.535 jiwa.

8.2. Tekanan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bangli per Oktober 2008 adalah sebanyak 227.163 jiwa dengan rincian di Kecamatan Kintamani sebanyak 96.636 jiwa, di Kecamatan Susut sebanyak 43.985 jiwa, di Kecamatan Tembuku sebanyak 39.988 jiwa dan di Kecamatan Bangli sebanyak 46.544 jiwa. Jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Bangli adalah di Kecamatan Susut dengan kepadatan 892,01 jiwa/km² sedangkan jumlah penduduk terjarang berada di Kecamatan Kintamani dengan kepadatan 286,82 jiwa/km².

Munculnya permukiman kumuh disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kemiskinan penduduk disebabkan oleh berbagai faktor yang saling bersinergi seperti kemiskinan dan kekeringan sumber daya alam, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dengan kemiskinan struktural. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan indikator rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini akan mempengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan, ketrampilan, jenis pekerjaan dan rendahnya pendapatan, sehingga memunculkan kemiskinan ekonomi dan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat dan munculnya permukiman kumuh.

8.3. Respon

Dalam usaha penanganan sampah kedepan diperlukan

- Peningkatan partisipasi masyarakat serta ikut aktif memikirkan dan menunjukkan sikap dan perilaku dalam penanganan sampah
- Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, sehingga mengurangi volume sampah yang dihasilkan
- Meningkatkan penggunaan bahan yang dapat terurai secara alamiah

- Melakukan pemilahan untuk sampah yang dapat didaur ulang, sehingga mengurangi kuantitas dan kualitas sampah
- Meningkatkan usaha daur ulang
- Membuang sampah pada tempat-tempat

Permasalahan Sanitasi Lingkungan

- Tingkatkan anggaran APBD untuk pembangunan kesehatan
- Tingkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pengadaan dan perolehan data, serta dalam penanganan kesehatan masyarakat
- Pengangkatan tenaga medis yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang optimum
- Tingkatkan jumlah pemberian kartu sehat untuk orang miskin
- Perlu digalakkan pengobatan tradisional yang berbasis kearifan lingkungan
- Lomba rumah sehat dan pemberian insentif bagi para pemenang
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA dan Pelestarian lingkungan hidup;
- Tingkatkan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan

Menurunnya Budaya Hidup Sehat

- Melakukan pengawasan secara intensif terhadap perilaku anak dan generasi muda baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat untuk mencegah perilaku hidup yang kurang sehat
- Perilaku budaya hidup sehat ditingkatkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya luhur (budipekerti) sejak usia dini serta pendidikan lingkungan sehat melalui penyuluhan dan pelatihan.
- Perlu dibuatkan perda larangan merokok di tempat-tempat tertentu
- Tingkatkan bantuan bangunan fisik dan jamban kepada penduduk miskin

Masalah Kemiskinan

- Memberikan beasiswa bagi anak kurang mampu dan siswa berprestasi
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
- Meningkatkan pelaksanaan padat karya
- Memperluas kesempatan kerja
- Memberikan bantuan dan merehabilitasi penyandang masalah sosial
- Memberdayakan potensi dan mengembangkan perlindungan sosial
- Mengembangkan jaminan sosial

- Tingkatkan program pengentasan kemiskinan melalui sistem Bapak Angkat;
- Meningkatkan anggaran biaya dari APBD maupun APBN untuk pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Asdep Kehati Klh. 2005. Target 2010 Keanekaragaman Hayati: kehati@menlh.go.id
- Bappeda Provinsi Bali. 2006. Data Bali Membangun 2005
- BPS Kabupaten Bangli. 2006. Bangli Dalam Angka 2004/ 2005
- Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangli. 2007. Laporan SKPD Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan di Kabuapten Bangli
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. 2007. Laporan semesteran pelayanan kesehatan di masing masing puskesmas di Kabupaten Bangli
- Kantor Litbang Kabupaten Bangli. 2006. Kajian teknis Pertambangan Kabupaten Bangli
- Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2005, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-5328/MENLH/10/2005 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Status Lingkungan Hidup Propinsi dan Kabupaten / Kota
- Pemerintah Provinsi Bali. 2003. Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali Tahun 2000-2005
- Pemerintah Kabupaten Bangli. 2001. Program Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2006-2010
- Pemerintah Provinsi Bali. 2005. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2005 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Provinsi Bali
- Pemerintah Provinsi Bali. 2005. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1992. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Tata Ruang
- Pemerintah Republik Indonesia, 1997. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNUD, 2006. Studi Identifikasi Potensi Bencana Alam di Provinsi Bali .